



**Katharina Millenia  
 Irene<sup>1</sup>  
 Andreas Rengga<sup>2</sup>  
 Maria Silvana  
 Mariabel Carcia<sup>3</sup>**

**PERAN BADAN PERENCANAAN DAN  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 (BAPELITBANG) MELALUI BIDANG  
 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
 MANUSIA (PPM) DALAM KOORDINASI  
 PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN  
 SIKKA**

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) dalam Koordinasi Pencegahan Stunting di Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan pada kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan melalui bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dalam koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan adalah metode kegiatan magang. Data yang dikumpulkan adalah melalui hasil wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa peran Bapelitbang melalui Bidang Pemerintahan Pembangunan manusia dalam koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Si kka.

**Kata kunci:** BAPELITBANG; Pemerintahan Daerah; Pencegahan Stunting

**Abstract**

This article aims to find out and analyze the role of the planning and research and Development Agency (Bapelitbang) in coordinating stunting prevention in Sikka regency. This work intership activity was carried out at the planning and Research and Development Agency office through the Human Development Government sector in coordinating stunting prevention in Sikka Regency. The method used in the internship activity method. The data collected was through interviews and analyzed qualitatively. The results of this research show that the role of Bapelitbang through the Human Development Government sector is in coordinating stunting prevention in Sikka Regency.

**Keywords :** BAPELITBANG; Local Government; Stunting Prevention

**PENDAHULUAN**

Perubahan dalam aspek sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang mengharuskan seseorang mampu beradaptasi serta dapat menghadapi perubahan tersebut dengan sebaik mungkin. Dalam menyikapi hal tersebut Perguruan Tinggi di harapkan dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran inovatif yang tidak hanya terbatas pada teori dan praktik dalam skala kecil tetapi mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan di masa depan.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan yaitu mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi (Permendikbud, 2020).

Kampus Merdeka adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda atau

<sup>1,2,3</sup>) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa  
 email: katharinairene8@gmail.com

mahasiswa untuk berkarir di masa depan dengan memberikan kesempatan untuk mengasah dan menggali minat dan bakat mereka serta mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Salah satu program dari kampus merdeka yaitu magang mahasiswa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terutama magang mahasiswa sebagai langkah untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, mengenal dan mengetahui dunia profesi atau sistem kerja dunia profesional yang sebenarnya. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa akan mengalami keterlibatan langsung dan mendalam sebagai pengalaman yang berguna di kehidupan setelah menempuh perkuliahan, gambaran nyata dunia kerja, membangun relasi dan koneksi di dalam industri tempat magang, serta perkembangan maupun keberlanjutan karier untuk kedepannya di dunia pekerjaan.

Hermanto et al (dalam Santri dan Atmaja, 2022) yang menyebutkan bahwa kegiatan program magang yang dilakukan didalam sebuah industri, organisasi, perusahaan akan memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa. Program Magang ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yaitu memperoleh pengalaman di lapangan secara langsung. Program magang ini juga dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Kegiatan magang yang ini dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintah Kabupaten Sikka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Bapelitbang Kabupaten Sikka menjalankan fungsinya untuk melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyusun perencanaan kebijakan anggaran daerah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Bapelitbang Kabupaten Sikka khususnya di bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) memiliki kewajiban untuk melakukan motivasi dan koordinasi terhadap program lintas sektor karena dalam pelaksanaannya memerlukan kontribusi dari sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang ada, seperti halnya yang dilaksanakan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting.

Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Peraturan Bupati Tentang Peran Desa Yakni Peraturan Bupati yang memperjelas kewenangan desa dalam pencegahan stunting terintegrasi atau bisa juga berupa peraturan baru atau hasil revisi peraturan yang ada. (Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Sistem manajemen data bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Mengukur prevalensi stunting di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/ kota secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya, memecahkan masalah dan memantau proses perencanaan di tingkat desa hingga kabupaten/ kota, dan advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program, Status Gizi Anak, BB/U : Gizi buruk, Gizi kurang, Gizi baik atau Gizi lebih, TB/U : Sangat Pendek, Pendek, Normal dan BB/TB: Sangat kurus, Kurus, Normal, Gemuk.

Tujuan dari laporan magang ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Badan Peencanaan dan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) dalam Koordinasi Pencegahan Stunting di Kabupaten Sikka.

## METODE

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Perencana dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka, khususnya di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM). Kegiatan magang dilakukan dalam urun waktu kurang lebih 5 bulan, di mulai dari 16 Agustus 2023 sampai 23 Desember 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kegiatan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara bersama kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Bapelitbang Dalam Koordinasi Pencegahan Stunting

Menurut Bapak Hironimus Laja selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapelitbang di bidang PPM turut mengambil peran dalam koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Sikka sesuai cuplikan wawancara berikut :

“Bapelitbang sebagai leading sektor koordinasi memiliki peran dalam mengendalikan perangkat daerah yang terlibat untuk turut serta dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan stunting dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana serta komunikasi melalui Dinas Kesehatan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah lainnya”.

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terlambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun, Penyebab utama dari stunting adalah bukan hanya dominan karena sebab gizi buruk pada masa kehamilan namun terdapat juga faktor sosial ekonomi, ketersediaan pelayanan kesehatan seperti sarana prasarana, air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya. Landasan yang digunakan untuk penanganan stunting yaitu Peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting masyarakat perlunya kolaborasi, sinergi dan koordinasi dalam sebuah aksi konvergensi agar target penurunan menjadi 14% secara nasional (RPJM Nas), atau 1 (Satu) digit secara provinsi serta 0% dalam RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 dapat tercapai. Untuk mengukur pencapaian penurunan stunting, Pemerintahan menggunakan sistem online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) hal ini penting untuk pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu dapat terpenuhi, aplikasi ini merupakan sistem pencatatan dan sistem pelaporan gizi anak berbasis masyarakat guna mendapatkan pendataan yang cepat dan akurat.

### Penyebab Dari Stunting

Menurut Kabid PPM Bapak Hironimus Laja menjelaskan bahwa :

“Penyebab utama dari stunting adalah bukan hanya dominan karena sebab gizi buruk pada masa kehamilan namun, terdapat juga faktor sosial ekonomi, ketersediaan pelayanan kesehatan seperti sarana dan prasarana air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya”.

Ada 5 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 pada pasal 6 ayat 2 yaitu:

1. Komitmen dan visi kepemimpinan;
2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
3. Konvergensi program pusat, daerah, dan desa;
4. Ketahanan pangan dan gizi; dan
5. Pemantauan dan evaluasi.

Pada pilar ketiga: konvergensi program pusat, daerah dan desa. Konvergensi percepatan penurunan stunting merupakan kerjasama yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dengan tujuan pada sasaran prioritas penurunan stunting. Penyelenggaraan dilakukan dengan konvergensi artinya dilakukan secara intergrasi dan penyesuaian dengan kegiatan dan program pada tingkat kab/kota sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, peran Bapelitbang sebagai leading sektor koordinasi memiliki peran dalam mengendalikan Perangkat Daerah yang terlibat untuk turut serta dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan stunting.

Landasan yang digunakan untuk penanganan stunting yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Pada tahun 2024

telah ditetapkan pada Peraturan Presiden pasal 5 ayat 1 bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting harus dicapai sebesar 14 persen.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting**

Secara 5 Tahun Terakhir Dapat Menurunkan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Sikka  
Kabid PPM Bapak Hironimus Laja menjelaskan bahwa:

“Melaksanakan ketentuan peraturan yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada pasal 10 ayat 3 tentang penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, dan memperkuat kelembagaan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting( TPPS ) untuk melaksanakan aksi-aksi integrasi”.

Ini bahwa, dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kota, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa adalah:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
- b. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan.
- c. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Dari aturan Perpres tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka menindaklanjuti terkait percepatan penurunan stunting dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Sikka Nomor 152 / HK / 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sikka diantaranya:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan, sebagai bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan.
- b) Dinas Kesehatan, sebagai bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
- c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga.

Instansi tersebut merupakan koordinator dalam tim percepatan penurunan stunting di Kab. Sikka. Perangkat Daerah tersebut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam SK dimaksud.

Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran sasaran rumah tangga 1.000 HPK dengan strategi/pendekatan:

#### 1) Pendekatan Sensitif

Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara perangkat daerah dan Lembaga. Ada 11 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Sensitif sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih
- b. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi
- c. Melakukan fortifikasi bahan pangan
- d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)
- e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- f. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
- g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua
- h. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal
- i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat
- j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja
- k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin
12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi

#### 2) Pendekatan Spesifik

Intervensi Gizi Spesifik dilakukan melalui :

- a. Intervensi dengan sasaran ibu hamil, yang dilakukan melalui beberapa program/kegiatan berikut: a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan

energi dan protein kronis b) Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat  
 c) Program untuk mengatasi kekurangan iodium d) Pemberian obat cacung untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil.

- b. Intervensi untuk melindungi ibu hamil dari malaria Jenis kegiatan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal meliputi pemberian suplementasi besi folat minimal 90 tablet, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, melakukan upaya untuk penanggulangan cacung pada ibu hamil, dan memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.
- c. Intervensi yang menasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan, termasuk diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI jolong/colostrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada anak balitanya. Kegiatan terkait termasuk memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat.
- d. Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan, dengan mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacung, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

#### **Kendala Atau Faktor Penghambat Dalam Upaya Penurunan Stunting Oleh Tim Koordinasi**

- a. Persepsi yang keliru bahwa stunting adalah penyakit turunan.

Artinya kondisi tubuh anak yang pendek sering dianggap hasil turunan dari para orangtuanya. Padahal, anak mereka yang tubuh tingginya pendek bisa terindikasi bukan karena faktor genetika semata, tetapi menandakan kalau dia mengalami kekurangan gizi. Faktanya, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang nilainya paling kecil jika kita membandingkan hal tersebut ke hal-hal lain seperti perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan hingga ke pelayanan kesehatan.

- b. Persepsi sebagian warga bahwa hanya pemerintah saja yang menangani stunting

Upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting terasa cukup massif dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, namun sering kali ditemui, masyarakat kurang aktif bahkan cenderung apatis untuk berkolaborasi menangani stunting. Contoh nyata saat pemberian PMT, masyarakat atau orang tua yang punya anak stunting kurang aktif memberikan makanan tambahan yang bergizi sesuai anjuran.

- c. Kurang memperhatikan asupan gizi untuk anak.

Faktor utama anak mengalami stunting karena kurangnya gizi yang diperoleh, baik dalam masa kandungan hingga setelah mereka lahir. Banyak juga yang beranggapan bahwa makanan yang penuh gizi adalah makanan yang mahal, padahal hal tersebut kuranglah tepat. Yang sangat disayangkan yaitu ketika sang ayah lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membeli rokok daripada untuk membeli makanan yang bergizi. Begitu juga bagi sang ibu, banyak yang tidak memberikan ASI eksklusif bagi sang buah hati hingga 2 tahun.

#### **Dari Data Yang Ada, Pada Bulan Agustus 2023 Terjadi Peningkatan Prevelensi Stunting**

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Secara umum, naiknya angka stunting yaitu:

- a. Pola Perilaku dan kesadaran masyarakat masih rendah terkait pola asuh dan konsumsi makanan bergizi.
- b. Masih Kurangnya kegiatan bimbingan perkawinan dengan muatan materi pencegahan stunting.
- c. Belum Optimalnya Edukasi dan pendampingan kesehatan bagi Usia anak dan remaja.

Masih terdapat Balita Gizi Kurang. Pada Tahun 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 Balita Wasting Sebanyak 2286 Dari Sasaran 22204 (10,5 %).

#### **SIMPULAN**

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu

panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terlambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Bapelitbang memiliki peran penting sebagai leading sector untuk mengkoordinasikan seluruh komponen agar mampu melaksanakan tugas secara maksimal. Untuk mengukur pencapaian penurunan stunting, Pemerintahan menggunakan sistem online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) hal ini penting untuk pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu dapat terpenuhi, aplikasi ini merupakan sistem pencatatan dan pelaporan gizi anak berbasis masyarakat guna mendapatkan pendataan yang cepat dan akurat.

Upaya yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) adalah:

Melaksanakan ketentuan peraturan yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada pasal 10 ayat 3 tentang penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bahwa, dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kota, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah:

1. Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan.
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan.
3. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M. (2012). Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kecamatan X Tahun 2012. Skripsi, Universitas Y.
- Aprilia, Maria, Maria Silvana Mariabel Carcia, and Yosef Tonce. "Pengaruh Perilaku Kerja Dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka (Pada Desa Ian Tena, Desa Wairkoja, Desa Seusina Dan Desa Namangkewa)." *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1.1 (2023): 70-80.
- Hiasinta Claurita Insani, Andreas Rengga, & Yustina Olivia Da Silva. (2023). Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(3), 25–35.
- Lainua, I. G. P. (2016). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting pada Balita di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 11(2), 123-130.\*\*
- Maria Handayani Yunita Wale, Maria Silvana Mariabel Carcia, & Yustina Olivia Da Silva. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Dan Penelitian Kabupaten Sikka. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 171–179. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.26>
- Marselina Afrila Wio, Andreas Rengga, & Magdalena Silawati Samosir. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(3), 103–114.
- Maria Rislianty Nona Rit, Antonius Philippus Kurniawan, & Yustina Olivia Da Silva. (2023). Pengaruh Etos Kerja Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Perumda Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(3), 38–50.
- Mahrus, M., Irawati, R., & Yuliati, L. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stunting pada Balita di Kabupaten X Tahun 2022. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*
- Pearce II, J. A., & Robinson, R. B. (2013). *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control* (11th ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Wisang, Imelda Virgula, and Cicilia Ayu Wulandari. "Dampak Budaya Kerja Terhadap Kinerja Kerja Perangkat Desa Samparong Kecamatan Alok Kabupaten Sikka." *EBISMAN: eBisnis Manajemen* 1.2 (2023): 41-50.